



I N T E G R A
G R O U P

**Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Yang Tidak Diaudit
Tanggal 31 Maret 2022**

**PT Integra Indocabinet Tbk
dan Entitas Anaknya**

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

**Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	1
Laporan Laba Rugi Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	5 - 52

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2022 DAN 2021
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Halim Rusli |
| Alamat Kantor | : Desa Betto RT 013, RW 007
Betto, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Margorejo Indah B-825
Kec. Wonocolo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8911209 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Wang Sutrisno |
| Alamat Kantor | : Desa Betto RT 013, RW 007
Betto, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Kertajaya Indah Timur 17/56
Kec. Sukolilo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8911209 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Integra Indocabinet Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 27 Mei 2022
Atas nama dan mewakili Direksi

 Halim Rusli Direktur Utama		 Wang Sutrisno Direktur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan/Notes	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2, 5, 25	377.660.873.098	116.906.090.167
Piutang usaha			
Pihak ketiga, bersih	2, 6, 25	803.025.853.493	698.822.979.238
Pihak berelasi		407.052.410	7.171.185.531
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	2, 7	31.356.016.566	29.341.221.891
Pihak berelasi		148.070.004.792	139.763.822.656
Persediaan	2, 8	2.476.593.508.430	2.603.604.618.493
Pajak dibayar di muka	2, 9	225.938.334.003	225.052.156.589
Biaya dibayar di muka	2	5.895.576.679	7.760.759.273
Uang muka pembelian	2, 10	425.774.732.289	477.134.411.850
Taksiran tagihan pajak	2	-	5.066.027.284
Jumlah Aset Lancar		4.494.721.951.760	4.310.623.272.972
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian	2, 10	47.570.558.993	62.856.760.293
Aset pajak tangguhan	2	17.873.744.962	17.873.744.962
Aset Biologis		14.350.068.012	14.285.061.717
Taksiran tagihan pajak		1.177.372.562	3.733.453.264
Investasi	2	39.469.672.265	39.469.672.265
Aset tetap - bersih	2, 11	2.265.008.841.221	2.251.984.214.495
Aset Hak Guna Usaha		93.700.115.920	93.850.908.906
Aset lain-lain - bersih	2, 12	7.416.210.667	6.357.689.756
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.486.566.584.602	2.490.411.505.658
JUMLAH ASET		6.981.288.536.362	6.801.034.778.630

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT (Lanjutan)
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan/Notes	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank dan lembaga			
keuangan bukan bank	2, 13, 26	1,009,985,842,102	1,461,304,681,505
Utang obligasi	2, 18	42,180,000,000	42,180,000,000
Utang sukuk mudharabah	2, 18	52,500,000,000	52,500,000,000
Utang usaha	2, 14, 26		
Pihak ketiga		193,150,711,395	172,717,463,192
Pihak berelasi	24	31,759,370	21,765,240
Utang lain-lain	2		
Pihak ketiga		5,123,226,242	5,486,426,194
Pihak berelasi	24	1,697,723,605	1,700,000,042
Beban akrual	2, 18	30,419,725,719	41,651,556,880
Utang pajak	2, 16	149,528,294,113	130,884,725,127
Liabilitas kontrak	2, 17	32,986,456,036	62,197,498,089
Utang jangka panjang			
yang jatuh tempo dalam			
waktu satu tahun			
Utang bank dan lembaga			
keuangan bukan bank	2, 13	107,856,222,887	85,682,768,158
Liabilitas sewa	2	26,355,716,252	27,821,269,520
Jumlah Liabilitas		1,651,815,677,721	2,084,148,153,947
Jangka Pendek			
LIABILITAS			
JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang, setelah			
dikurangi bagian yang jatuh			
tempo dalam waktu satu tahun :			
Utang bank dan lembaga			
keuangan bukan bank	2, 13	516,878,235,416	467,995,798,305
Liabilitas sewa	2	22,112,346,611	25,449,575,382
Utang obligasi	2, 18	653,384,742,700	404,901,361,575
Utang sukuk mudharabah	2, 18	206,530,000,000	97,500,000,000
Liabilitas pajak tangguhan	2	43,674,278,760	43,674,278,760
Liabilitas imbalan kerja	2	36,947,520,303	34,013,572,737
Laba yang ditangguhkan atas transaksi			
penjualan dan penyewaan kembali	2	630,248,732	814,283,956
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1,480,157,372,522	1,074,348,870,715
JUMLAH LIABILITAS		3,131,973,050,243	3,158,497,024,662

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* yang tidak diaudit ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT (Lanjutan)
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan/Notes	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal			
Rp 100 per saham pada periode			
31 Maret 2022 dan Tahun 2021	19	636,250,000,000	636,250,000,000
Tambahan modal disetor	2, 19	299,314,475,737	299,314,475,737
Komponen ekuitas lainnya		147,797,525,171	147,797,525,171
Penghasilan Komprehensif lain	2, 9, 11, 19	884,591,795,050	884,591,795,050
Saldo laba	19		
Belum ditentukan penggunaannya		1,572,123,844,395	1,365,509,997,477
Ditentukan penggunaannya		298,467,152,229	298,467,152,229
Sub-jumlah		3,838,544,792,582	3,631,930,945,664
Kepentingan non-pengendali	2, 20	10,770,693,537	10,606,808,304
JUMLAH EKUITAS		3,849,315,486,119	3,642,537,753,968
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6,981,288,536,362	6,801,034,778,630

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan/Notes	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)
PENJUALAN BERSIH	2, 21, 24	1,975,681,701,627	912,059,959,195
BEBAN POKOK PENJUALAN	2, 22, 24	1,314,966,606,150	610,998,202,384
LABA BRUTO		660,715,095,477	301,061,756,811
Beban Penjualan	2, 23	287,864,012,292	70,592,918,714
Beban umum dan administrasi	2, 23, 24	50,808,624,481	41,576,581,979
Jumlah Beban Operasional		338,672,636,773	112,169,500,693
Pendapatan Operasional		322,042,458,704	188,892,256,118
Pendapatan (Beban) Lain - Lain			
Beban bunga	2	(54,049,709,478)	(53,056,190,441)
Beban administrasi bank	2	(1,614,111,992)	(1,896,273,562)
Penghasilan bunga	2	88,078,863	61,120,091
Penghasilan sewa	2	6,000,000	-
Lain - lain bersih	2	4,067,488,474	(7,136,772,453)
Laba (rugi) pelepasan aset tetap	2	(538,701,372)	1,252,281,361
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2	(1,676,587,768)	7,088,475,788
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain - Lain		(53,717,543,273)	(53,687,359,216)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK		268,324,915,431	135,204,896,902
MANFAAT (BEBAN) PAJAK			
Kini	2	(61,547,183,280)	(33,357,001,590)
Tangguhan		-	-
Jumlah beban pajak - bersih		(61,547,183,280)	(33,357,001,590)
LABA TAHUN BERJALAN		206,777,732,151	101,847,895,312
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		206,613,846,918	101,831,000,774
Kepentingan non-pengendali		163,885,233	16,894,538
LABA TAHUN BERJALAN		206,777,732,151	101,847,895,312
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN		206,777,732,151	101,847,895,312
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	2, 25	130.00	64.60

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	Catatan/ Notes	Modal saham	Tambahan Modal Disetor	Proforma modal dari akuisisi entitas sepengendali	Komponen ekuitas lainnya	Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Cadangan Pengukuran Imbalan Kerja	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Tax amnesty	Belum ditentukan penggunaannya	Ditentukan penggunaannya	Total	Kepentingan non- pengendali	Jumlah ekuitas
Saldo Awal - 1 Januari 2022		636,250,000,000	299,314,475,737	-	147,797,525,171	2,014,489,779	30,786,631,583	851,790,673,688	-	1,365,509,997,477	298,467,152,229	3,631,930,945,664	10,606,808,304	3,642,537,753,968
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	206,613,846,918	-	206,613,846,918	163,885,233	206,777,732,151
Tambahan modal disetor	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Penyesuaian Proforma	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Maret 2022		636,250,000,000	299,314,475,737	-	147,797,525,171	2,014,489,779	30,786,631,583	851,790,673,688	-	1,572,123,844,395	298,467,152,229	3,838,544,792,582	10,770,693,537	3,849,315,486,119

	Catatan/ Notes	Modal saham	Tambahan Modal Disetor	Proforma modal dari akuisisi entitas sepengendali	Komponen ekuitas lainnya	Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Cadangan Pengukuran Imbalan Kerja	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Tax amnesty	Belum ditentukan penggunaannya	Ditentukan penggunaannya	Total	Kepentingan non- pengendali	Jumlah ekuitas
Saldo Awal - 1 Januari 2021		630,625,000,000	223,992,113,415	-	147,648,342,650	-	-	896,015,500,169	-	1,121,195,729,806	-	3,019,476,686,040	10,360,695,649	3,029,837,381,689
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	101,831,000,774	-	101,831,000,774	16,894,538	101,847,895,312
Tambahan modal disetor	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Penyesuaian Proforma	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Maret 2021		630,625,000,000	223,992,113,415	-	147,648,342,650	-	-	896,015,500,169	-	1,223,026,730,580	-	3,121,307,686,814	10,377,590,187	3,131,685,277,001

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

**Untuk periode tiga bulan yang berakhir
Pada tanggal 31 Maret 2022**

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1,849,031,918,440	1,006,353,722,822
Pembayaran kas kepada pemasok, direksi, karyawan dan beban operasional lain-lain	(1,417,739,687,456)	(917,602,388,139)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	431,292,230,984	88,751,334,683
Penghasilan keuangan	88,078,863	61,120,091
Beban keuangan	(51,040,993,595)	(57,631,584,530)
Pembayaran pajak	(42,853,667,528)	(17,441,593,885)
Penerimaan pajak	7,723,167,484	11,525,794,305
Lain-lain - bersih	3,350,751,877	(3,114,272,453)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	348,559,568,085	22,150,798,211
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(19,339,679,627)	(11,749,638,725)
Perolehan aset hak guna	(7,615,000)	-
Perolehan aset lain-lain	(1,307,936,000)	(233,000,000)
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(5,058,518,712)	(3,043,718,140)
Hasil Penjualan aset tetap	4,207,577,379	24,469,656,115
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(21,506,171,960)	9,443,299,250
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan utang bank dan LKBB jangka panjang	98,000,000,000	388,676,487
Pembayaran utang bank dan dan LKBB jangka panjang	(27,493,033,025)	(41,773,313,998)
Penambahan utang bank dan LKBB jangka pendek	897,894,580,331	1,710,598,251,416
Pembayaran utang bank dan LKBB jangka pendek	(1,329,394,519,980)	(1,741,760,620,074)
Penambahan obligasi jangka panjang	250,000,000,000	-
Penambahan sukuk mudharabah jangka panjang	109,030,000,000	-
Pembayaran utang sewa	(32,850,332,141)	(7,999,391,747)
Pembayaran beban keuangan (obligasi & sukuk)	(3,359,623,042)	-
Perolehan (pembayaran) utang lain-lain	-	17,998,858,012
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(38,172,927,857)	(62,547,539,904)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

**Untuk periode tiga bulan yang berakhir
Pada tanggal 31 Maret 2022**

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN	288,880,468,268	(30,953,442,443)
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	(8,137,798,239)	1,274,514,921
KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL TAHUN	90,083,912,069	1,064,892,094
KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR TAHUN	370,826,582,098	(28,614,035,428)
Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari:		
Kas dan setara kas	377,660,873,098	30,339,066,295
Cerukan	(6,834,291,000)	(58,953,101,723)
JUMLAH	370,826,582,098	(28,614,035,428)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM**a. Pendirian Perusahaan**

PT Integra Indocabinet, Tbk ("Perusahaan" atau "ITG") didirikan berdasarkan akta notaris Soetjipto, S.H., No. 147 tanggal 19 Mei 1989. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-320.HT.01.01.th'90 tanggal 20 Januari 1990.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Susanti, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 17 Juni 2019 mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0033818.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 1 Juli 2019.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Perusahaan berkedudukan di Sidoarjo dan saat ini bergerak dalam bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasinya pada tahun 1989.

PT Integra Indo Lestari (IIL) adalah entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/D.04/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana telah dinyatakan efektif. Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan mencatatkan 1.250.000.000 lembar sahamnya dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 260 per saham.

c. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-52/D.04/2021, tanggal 8 April 2021, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan total penawaran umum masing-masing sebesar Rp 700.000.000.000 dan Rp 300.000.000.000.

Perusahaan telah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia Obligasi dan Sukuk Mudharabah Tahap I masing masing sebesar Rp 450.000.000.000 dan Rp 150.000.000.000 pada tanggal 15 April 2021.

Perusahaan telah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia Obligasi dan Sukuk Mudharabah Tahap II masing masing sebesar Rp 250.000.000.000 dan Rp 109.030.000.000 pada tanggal 28 Maret 2022.

d. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Aktivitas Bisnis	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan	Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)		
				31 Maret 2022			
				31 Mar, 2022	31 Des, 2021	31 Mar, 2022	31 Des, 2021
Entitas Anak Langsung							
PT Narkata Rimba (NKT)	Kalimantan Timur	a	1978	99.00%	99.00%	148,755	146,595
PT Belayan River Timber (BRT)	Kalimantan Timur	a	1972	99.32%	99.32%	325,555	316,601
PT Intertrend Utama (ITR)	Sidoarjo	b	1993	99.79%	99.79%	2,053,932	2,156,815
PT Interkraft (ITK)	Sidoarjo	b	2002	99.53%	99.53%	1,110,715	1,060,873
PT Intera Indonesia (INT)	Sidoarjo	b	2012	99.89%	99.89%	1,083,577	1,074,605
PT Inter Kayu Mandiri (IKM)	Sidoarjo	c	2015	80.00%	80.00%	16,598	16,598
Entitas Anak Tidak Langsung							
<u>Melalui PT Intertrend Utama (ITR)</u>							
PT Superalam Mas (SAM)	Tulungagung	d	2006	100.00%	100.00%	14,395	14,335
<u>Melalui PT Belayan River Timber (BRT)</u>							
PT Kandelia Alam (KDA)	Kalimantan Barat	e	2001	80.00%	80.00%	2,228	1,591
PT Borneo Forestama Lestari (BFL)	Kalimantan Timur	e	2021	100.00%	100.00%	11,917	19,772
PT Borneo Wana Utama (BWU)	Kalimantan Timur	e	2021	100.00%	100.00%	12,123	18,378

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak (Lanjutan)

Aktivitas Bisnis Entitas Anak / *Subsidiaries's Business Activity*

a. Industri Hak Pengelolaan Hutan/ *Forest Concession Right Industry*

b. Industri Mebel/ *Furniture Industry*

c. Perusahaan Induk/ *Holding Company*

d. Perkebunan/ *Plantation*

e. Belum beroperasi secara komersial/ *Not yet in commercial operation*

Perubahan dalam entitas anak selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

PT Superalam Mas

Berdasarkan akta notaris Julia Seloadji, S.H., No. 23 tanggal 16 November 2020, para pemegang saham SAM menyetujui pengalihan saham SAM milik Muhchin Karli, Hendro Rusli dan William Kurniawan Rusli kepada INT, sehingga INT memiliki 200 lembar saham dengan nominal Rp 500.000 per saham. Persentase kepemilikan INT adalah sebesar 40%.

Berdasarkan akta notaris Julia Seloadji, S.H., No. 29 tanggal 19 November 2020, para pemegang saham SAM menyetujui pengalihan saham SAM milik Hendro Rusli dan Widjaja Karli kepada ITR, sehingga ITR memiliki 185 lembar saham dengan nominal Rp 500.000 per saham. Persentase kepemilikan ITR adalah sebesar 37%.

Berdasarkan akta notaris Julia Seloadji, S.H., No. 40 tanggal 25 November 2020, para pemegang saham SAM menyetujui pengalihan saham SAM milik Halim Rusli kepada ITR, sehingga ITR memiliki 300 lembar saham dengan nominal Rp 500.000 per saham. Persentase kepemilikan ITR menjadi sebesar 60%.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn No. 15 tanggal 28 Desember 2020, para pemegang saham SAM menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 250.000.000 menjadi Rp 6.750.000.000 yang disetor oleh ITR dan INT masing-masing sebesar Rp 3.900.000.000 dan Rp 2.600.000.000. Persentase kepemilikan ITR dan INT masing-masing sebesar 60% dan 40%.

PT Kandelia Alam

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn, No. 10 tanggal 21 Juni 2021, para pemegang saham KDA menyetujui pengalihan saham milik Ir. Fairus Mulia kepada BRT, sehingga BRT memiliki 1.200 lembar saham. Persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebesar 30%.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn, No. 11 tanggal 21 Juni 2021, para pemegang saham KDA menyetujui pengalihan saham milik Djaya Iskandar kepada BRT, sehingga BRT memiliki 2.200 lembar saham. Persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebesar 55%.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn, No. 12 tanggal 21 Juni 2021, para pemegang saham KDA menyetujui pengalihan saham milik Sumitro kepada BRT, sehingga BRT 3.200 lembar saham. Persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebesar 80%.

PT Borneo Forestama Lestari

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 14 tanggal 17 Desember 2021, BRT dan NKT memiliki penyertaan saham masing-masing sebesar 49.500 dan 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar saham pada BFL. Persentase kepemilikan BRT dan NKT masing-masing sebesar 99% dan 1%.

PT Boneo Wana Utama

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 13 tanggal 17 Desember 2021, BRT dan NKT memiliki penyertaan saham masing-masing sebesar 49.500 dan 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar saham pada BWU. Persentase kepemilikan BRT dan NKT masing-masing sebesar 99% dan 1%.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal **31 Maret 2022** adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hendro Rusli
Komisaris	:	Stephanie Kane Ilham
Komisaris Independen	:	Bing Hartono Poernomosidi
	:	Heri Sunaryadi

Direksi

Direktur Utama	:	Halim Rusli
Wakil Direktur Utama	:	Meity Linlin
Direktur	:	Widjaja Karli
	:	Syany Tjandra
Direktur Independen	:	Wang Sutrisno

Perusahaan dan Entitas Anaknya (bersama-sama disebut "Kelompok Usaha") memiliki 2.268 dan 1.954 orang karyawan tetap masing-masing pada tanggal **31 Maret 2022** (tidak diaudit) dan 31 Desember 2021.

f. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada 27 Mei 2022

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas mencakup kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang setelah dikurangi cerukan dan tidak dijaminkan.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Kelompok Usaha.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK"), untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

Berlaku efektif 1 Januari 2021:

- Penyesuaian tahunan PSAK No.1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK No.13: "Properti Investasi";
- Penyesuaian tahunan PSAK No.48: "Penurunan nilai aset";

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan";
- Amandemen PSAK No. 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran";
- PSAK No. 62: "Kontrak asuransi";
- Amandemen PSAK No. 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; dan
- Amandemen PSAK No. 73: "Sewa";

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Pengendalian didapat ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara khusus, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Kelompok Usaha memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Kelompok Usaha dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara yang lain;
- hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara dan hak potensial Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Kelompok Usaha akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan entitas anak disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi;
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Kelompok Usaha akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laba atau rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

d. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi.

Untuk setiap kombinasi bisnis, Kelompok Usaha memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

e. Akuntansi Penggabungan Usaha

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali dan diterapkan untuk kombinasi bisnis sepengendali yang memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis", baik untuk entitas penerima ataupun entitas yang melepas bisnis.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Akuntansi Penggabungan Usaha (Lanjutan)

Akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Dalam PSAK No. 38 (2012), pengalihan aset, kewajiban, saham dan instrumen kepemilikan lainnya dari entitas sepengendali tidak menghasilkan laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual dalam kelompok yang sama.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang dialihkan harus dicatat sebesar nilai buku sebagai penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Selisih antara nilai tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Kelompok Usaha jika mereka:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Kelompok Usaha;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha; atau
- (iii) merupakan personil manajemen kunci Kelompok Usaha atau entitas induk dari Perusahaan.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Kelompok Usaha jika:

- (a) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, Kelompok Usaha; (ii) memiliki kepentingan dalam Kelompok Usaha yang memberikan pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Kelompok Usaha;
- (b) suatu pihak adalah entitas asosiasi Kelompok Usaha;
- (c) suatu pihak adalah ventura bersama di mana Kelompok Usaha sebagai *venturer*;
- (d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Kelompok Usaha;
- (e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- (f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- (g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Kelompok Usaha atau entitas yang terkait dengan Kelompok Usaha.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Kelompok Usaha terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan penyertaan saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kelompok Usaha menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Kelompok Usaha dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Kelompok Usaha menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang di mana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Kelompok Usaha menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Kelompok Usaha mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Kelompok Usaha tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Kelompok Usaha.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "*worst case*" atau "*stress case*". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Kelompok Usaha tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang. Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, di mana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Penghasilan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui sebagai "Pendapatan keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. KKE didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Kelompok Usaha, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

KKE dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, KKE disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu *default* (KKE seumur hidup).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung KKE. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Kelompok Usaha menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Kelompok Usaha juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Kelompok Usaha tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Kelompok Usaha. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha terdiri dari utang bank dan lembaga keuangan bukan bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Kelompok Usaha tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan *fee* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mentransfer suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual suatu aset atau mentransfer liabilitas terjadi. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Kelompok Usaha harus memiliki akses ke pasar utama.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Hirarki Nilai Wajar (Lanjutan)

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan di mana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas di mana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada tingkat hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis;
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi di mana seluruh *input* yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi di mana seluruh *input* yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara Tingkat di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan tingkat hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang pada saat ditempatkan dan yang tidak dijadikan sebagai jaminan dan dibatasi dalam penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata yang meliputi harga pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi beban produksi tetap dan variabel, sebagai tambahan atas bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai persediaan, jika ada, ditetapkan berdasarkan penelaahan kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Penyertaan Saham

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari *investee* sejak tanggal perolehan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Penyertaan Saham (Lanjutan)

Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam investasi pada entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai terpulihkan atas investasi pada entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

Investasi saham pada entitas di mana Kelompok Usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat sesuai dengan PSAK No. 71.

l. Aset Biologis

Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir periode berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual kecuali ketika nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Kelompok Usaha mengukur Hutan Tanaman Industri (HTI) pada nilai perolehan karena manajemen yakin parameter yang digunakan pada pengukuran nilai wajar tidak dapat diandalkan.

Aset biologis merupakan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan pengembangan HTI dalam daur pertama, kecuali beban umum dan administrasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, dikapitalisasi dan ditangguhkan pembebanannya sampai saat HTI yang bersangkutan menghasilkan/siap ditebang, serta disajikan pada akun "Aset biologis" di laporan keuangan konsolidasian.

m. Aset Tetap

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, maka revaluasi secara tahunan perlu dilakukan. Revaluasi secara tahunan tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan, sehingga revaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali dianggap cukup.

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Surplus/defisit revaluasi aset tetap yang dipindahkan secara berkala setiap periode ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus/defisit revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap jumlah biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Pada saat pembaharuan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan dimulai saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	10-25
Sarana dan prasarana	10
Instalasi listrik	8-20
Mesin dan peralatan	4-16
Alat-alat berat	8
Kendaraan dan inventaris	4-8

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah oleh manajemen, dan jika perlu disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur masa manfaat aset yang diharapkan dan nilai sisa menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan jumlah terdepresiasi yang diperlukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak-hak tersebut di atas diakui sebagai aset yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur manfaat ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Aset tetap – bangun, kelola dan alih berupa bangunan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis dari aset tetap – bangun, kelola dan alih yang bersangkutan, maksimum sesuai jangka waktu perjanjian.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun/periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

n. Biaya Ditangguhkan atas Hak Pengusahaan Hutan

Biaya/iuran yang terjadi untuk memperoleh "Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)", seperti biaya Hak Pengusahaan Hutan ("HPH"), analisis mengenai dampak lingkungan, foto udara dan rencana karya pengusahaan hutan, ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa manfaat masing-masing IUPHHK tersebut dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu IUPHHK.

o. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung pada perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Biaya pinjaman dapat meliputi beban bunga, beban keuangan dalam sewa dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Beban bunga yang dikapitalisasi dihitung menggunakan biaya pinjaman rata-rata tertimbang Kelompok Usaha setelah penyesuaian pinjaman yang terkait dengan pembangunan spesifik. Ketika pinjaman telah dikaitkan dengan pembangunan spesifik, beban bunga yang dikapitalisasi adalah sebesar beban bunga kotor yang terjadi dikurangi dengan pendapatan atas investasi sementara yang dilakukan. Beban bunga dikapitalisasi dari awal pekerjaan pembangunan sampai dengan tanggal penyelesaian, ketika pekerjaan pembangunan telah selesai secara substansial.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Biaya Pinjaman (Lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset tersebut dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan sementara jika aktivitas pembangunan terganggu untuk waktu yang berkelanjutan. Beban bunga juga dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan dari properti yang diperoleh secara spesifik untuk pembangunan, tetapi hanya atas aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan properti sedang dalam penyelesaian.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset non-keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut untuk menentukan kerugian penurunan nilai (jika ada). Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan secara individual, Kelompok Usaha akan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas aset ("UPK").

Estimasi jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai dari aset atau UPK tersebut. Ketika jumlah terpulihkan suatu aset non-keuangan ("UPK") di bawah nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset ("UPK") diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan kerugian penurunan nilai yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

q. Sewa

Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Kelompok Usaha menilai apakah:

- a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b) Kelompok Usaha memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c) Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Kelompok Usaha mendesain aset dengan cara menetapkan untuk sebelumnya bagaimana dan tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal permulaan atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Sewa (Lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Sewa jangka-pendek dan sewa aset bernilai-rendah

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi pembelian). Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset pendasar bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Transaksi jual dan sewa-balik

Jika transaksi jual dan sewa-balik dicatat sebagai penjualan dan sewa pembiayaan, maka penjual-penyewa:

- mencatat sewa-balik dengan cara yang sama seperti mencatat sewa pembiayaan lainnya yang terjadi pada tanggal penerapan awal; dan
- lanjut mengamortisasi setiap keuntungan penjualan selama masa sewa.

r. Perpajakan

Pajak Kini

Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode sebelumnya dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan dari atau dibayarkan kepada Kantor Pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Kelompok Usaha sehubungan dengan situasi di mana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan. Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak ini terhadap liabilitas pajak ini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") kecuali:

- i) PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii) piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

s. Imbalan Kerja

Pada tahun 2021, Kelompok Usaha mengakui imbalan pascakerja manfaat pasti untuk karyawan berdasarkan Undang-undang No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja (2020: Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003), dan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja". Liabilitas imbalan kerja diukur berdasarkan laporan aktuaris

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan dan kerugian aktuaris;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi padatanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amandemen atau kurtailmenprogram; dan
- Tanggal pada saat Kelompok Usaha mengakui biaya restrukturisasi terkait.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkanditambah margin;

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut: (Lanjutan)

- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Kelompok Usaha mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu hanya jika entitas dapat mengukur kemajuan secara wajar terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Dalam beberapa keadaan, Kelompok Usaha mungkin tidak dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Kelompok Usaha memperkirakan untuk memulihkan biaya yang terjadi dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan.

Dalam keadaan tersebut, Kelompok Usaha mengakui pendapatan hanya sejumlah biaya yang terjadi sampai waktu tertentu di mana Kelompok Usaha dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basic*)

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama umur yang diharapkan dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, terhadap nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode/tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

Mata uang	31 Maret 2022	31 Desember 2021
US\$ 1	14,349	14,269
EUR 1	16,003	16,127
RMB 1	2,260	2,238

Transaksi dalam mata uang asing lainnya (jika ada) dianggap tidak signifikan.

v. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen dari Kelompok Usaha yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat didistribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

w. Laba per Saham Dasar

Jumlah laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun/periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun/periode yang bersangkutan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

w. Laba per Saham Dasar (Lanjutan)

Apabila jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya, maka jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

x. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya emisi yang terjadi sehubungan dengan penerbitan saham Perusahaan dikurangkan langsung dari "Tambahan Modal Disetor" yang diperoleh dari penawaran efek tersebut.

y. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Seluruh provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

z. Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi sangat kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila ada kemungkinan pemasukan manfaat ekonomi.

aa. Peristiwa setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Kelompok Usaha pada periode laporan keuangan (*adjusting events*) diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan merupakan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban pokok penjualan serta beban langsung terkait Kelompok Usaha.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi.

Rugi Penurunan Nilai Piutang

Kelompok Usaha menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) piutang usaha dan piutang lain-lain. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

a. Pertimbangan (Lanjutan)

Rugi Penurunan Nilai Piutang (Lanjutan)

Kelompok Usaha menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Revaluasi Tanah dan Bangunan

Kelompok Usaha mengukur tanah dan bangunan pada jumlah revaluasi dengan perubahan pada nilai wajar diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain ("OCI"). Kelompok Usaha melibatkan penilai independen dalam menentukan nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2018. Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan berdasarkan bukti pasar dengan menggunakan harga yang dapat dibandingkan dan disesuaikan terhadap faktor-faktor pasar spesifik seperti sifat, lokasi dan kondisi aset tersebut.

Sewa

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Pada tanggal permulaan kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Ketika nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Namun tidak terdapat kepastian bahwa Kelompok Usaha dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau keseluruhan dari aset pajak tangguhan tersebut.

Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh, atau negosiasi dengan, otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Taksiran Nilai Realisasi Neto Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas masa depan yang diproyeksikan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji.

Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
KAS	921,437,616	1,164,301,701
BANK		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	3,716,866,443	2,792,518,117
PT Bank Central Asia Tbk	11,444,665,272	9,821,476,491
PT Bank ICBC	40,416,226	62,424,346
PT Bank Mega Tbk	13,617,802	13,735,100
PT Bank Syariah Indonesia	6,347,424	2,173,189
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	6,804,689	6,892,359
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	2,011,746	2,011,746
PT Bank QNB Indonesia Tbk	224,697,338	742,053,060
PT Bank Pan Indonesia Tbk	43,930,159	43,930,159
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	178,932,445	204,921,901
<u>Dollar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	17,704,329,579	11,932,726,839
PT Bank Central Asia Tbk	18,748,066,848	38,259,278,773
PT Bank ICBC	69,938,342	82,929,460
PT Bank QNB Indonesia Tbk	11,685,552,306	34,816,367
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	2,533,258,863	1,941,073,109
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	88,525,000,000	49,798,827,450
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	97,975,000,000	-
PT Bank Syariah Indonesia	73,820,000,000	-
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	50,000,000,000	-
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	377,660,873,098	116,906,090,167

Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga sebesar 0.06% per tahun untuk deposito dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tahun 2021.

Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga sebesar 2% - 4,75% per tahun untuk deposito dalam mata uang Rupiah pada 31 Maret 2022.

Tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

5. PIUTANG USAHA – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Integriya Dekorindo	407,052,410	6,797,870,005
PT Alam Mentari Sejahtera	-	373,315,526
Sub Jumlah	407,052,410	7,171,185,531
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Pihak berelasi - bersih	407,052,410	7,171,185,531
 Ekspor	 586,713,949,515	 533,481,992,585
Lokal	220,718,191,092	169,747,273,767
Sub Jumlah	807,432,140,607	703,229,266,352
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,406,287,114)	(4,406,287,114)
Pihak ketiga - bersih	803,025,853,493	698,822,979,238
Jumlah - Bersih	803,432,905,903	705,994,164,769

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Rupiah	216,718,956,388	173,559,364,323
Dollar Amerika Serikat	586,713,949,515	532,434,800,446
Sub Jumlah	803,432,905,903	705,994,164,769

c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
1 - 30 hari	667,561,395,859	576,620,765,269
31 - 60 hari	99,103,710,259	93,327,488,114
61 – 90 hari	6,754,277,567	4,280,535,003
> 90 hari	30,013,522,218	31,765,376,383
Sub Jumlah	803,432,905,903	705,994,164,769

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Interkreasi Kerta Aji	31,309,457	31,309,457
PT Alam Mentari Sejahtera	1,000,000	1,000,000
PT Integriya Dekorindo	148,037,695,335	139,731,513,199
Sub Jumlah	148,070,004,792	139,763,822,656
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Tawotu	27,001,190,140	28,000,000,000
Lain-lain	4.354.826.426	1,341,221,891
Sub Jumlah	31.356.016.566	29,341,221,891
Jumlah	179.426.021.358	169,105,044,547

Pada tahun 2018, BRT, entitas anak, mengadakan perjanjian pinjaman untuk keperluan operasional kepada PT Tawotu.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai piutang.

7. PERSEDIAAN – BERSIH

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
<u>Manufaktur</u>		
Bahan baku dan pembantu	1.521.072.393.413	1,468,758,228,723
Barang dalam proses	442,662,279,071	516,015,807,630
Barang jadi	394,017,777,283	482,765,473,214
<u>Kehutanan</u>		
Bahan baku dan pembantu	122.941.255.207	139,892,529,196
Sparepart	4,567,425,764	4,840,202,038
Sub-Jumlah	2.485.261.130.738	2,612,272,240,801
Cadangan Penurunan Nilai	(8,667,622,308)	(8,667,622,308)
Jumlah	2.476.593.508.430	2,603,604,618,493

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang, oleh karena itu tidak dibentuk penyisihan atas persediaan usang.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

8. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari uang muka pembelian atas:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Aset tetap	47,570,558,993	62,856,760,293
Persediaan	410,072,874,081	448,196,348,697
Lain-lain	15,701,858,208	28,938,063,153
Jumlah	473,345,291,282	539,991,172,143

Disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:

Aset lancar	425,774,732,289	477,134,411,850
Aset tidak lancar	47,570,558,993	62,856,760,293
Jumlah	473,345,291,282	539,991,172,143

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, Kelompok Usaha memiliki uang muka pembelian aset tetap – tanah yang berlokasi di Lingkar Timur, Sidoarjo seluas ± 3.505 m² dengan nilai Rp 8.255.579.562.

9. PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham terdiri dari:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Metode ekuitas	23.478.889.779	23.478.889.779
	15.990.782.486	15.990.782.486
Jumlah	39.469.672.265	39.469.672.265

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

	Persentase kepemilikan	Biaya perolehan	Kenaikan atas perubahan nilai wajar	Nilai wajar
31 Maret 2022 dan 2021				
Melalui PT Inter Kayu Mandiri				
PT WoodOne Integra Indonesia (WII)	25%	16.560.000.000	2.014.489.779	18.574.489.779
PT Teknologi Optimal Prima (TOP)	8.92%	3.004.400.000	-	3.004.400.000
PT Interkreasi Kerta Aji (IKA)	19%	1.900.000.000	-	1.900.000.000
Jumlah/Total		21.464.400.000	2.014.489.779	23.478.889.779

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

10. ASET BIOLOGIS

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Saldo Awal	14,285,061,717	1,654,124,763
Penambahan	65,006,295	12,630,936,954
Saldo Akhir	14,350,068,012	14,285,061,717

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset biologis dapat dipulihkan seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset biologis tersebut.

11. ASET TETAP – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai tercatat					
Pemilikan langsung					
Tanah	1,122,447,043,813	4,913,927,651	-	-	1,127,360,971,464
Bangunan	613,211,222,086	-	-	615,000,000	613,826,222,086
Sarana prasarana	89,895,006,796	-	-	10,504,850,565	100,399,857,361
Instalasi listrik	48,765,697,865	2,339,636,364	-	-	51,105,334,229
Mesin dan peralatan	400,274,118,548	20,188,815,816	5,304,718,537	-	415,158,215,827
Alat-alat berat	189,703,260,247	-	-	-	189,703,260,247
Kendaraan	93,384,825,045	5,157,875,600	5,286,757,458	-	93,255,943,187
Inventaris	26,288,036,609	793,142,406	-	-	27,081,179,015
Sub-jumlah	2,583,969,211,009	33,393,397,837	10,591,475,995	11,119,850,565	2,617,890,983,416
Aset dalam penyelesaian	301,725,826,743	8,041,880,318	47,315,000	(11,119,850,565)	298,600,541,496
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	3,203,625,580	-	-	-	3,203,625,580
Jumlah	2,888,898,663,332	41,435,278,155	10,638,790,995	-	2,919,695,150,492
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	132,408,780,866	10,995,157,630	-	-	143,403,938,496
Sarana prasarana	42,795,320,542	2,379,910,707	-	-	45,175,231,249
Instalasi listrik	27,014,269,070	886,348,818	-	-	27,900,617,888
Mesin dan peralatan	163,988,570,383	5,504,601,312	3,676,036,523	-	165,817,135,172
Alat-alat berat	181,454,484,990	1,441,551,894	-	-	182,896,036,884
Kendaraan	67,025,661,525	1,865,110,966	2,216,475,721	-	66,674,296,770
Inventaris	21,443,937,464	548,473,465	-	-	21,992,410,929
Sub-jumlah	636,131,024,840	23,621,154,792	5,892,512,244	-	653,859,667,388
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	783,423,997	43,217,886	-	-	826,641,883
Jumlah	636,914,448,837	23,664,372,678	5,892,512,244	-	654,686,309,271
Nilai Buku	2,251,984,214,495				2,265,008,841,221

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (Lanjutan)

31 Desember 2021

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai tercatat					
Pemilikan langsung					
Tanah	1,122,447,043,813	-	-	-	1,122,447,043,813
Bangunan	547,812,756,101	2,368,014,300	1,519,449,900	64,549,901,585	613,211,222,086
Sarana prasarana	70,561,234,844	29,710,637,345	-	(10,376,865,393)	89,895,006,796
Instalasi listrik	47,134,345,365	1,631,352,500	-	-	48,765,697,865
Mesin dan peralatan	359,283,414,952	57,136,041,215	22,379,612,839	6,234,275,220	400,274,118,548
Alat-alat berat	187,093,260,247	2,610,000,000	-	-	189,703,260,247
Kendaraan	89,903,249,251	12,739,201,623	9,257,625,829	-	93,384,825,045
Inventaris	24,435,683,570	2,191,222,906	338,869,867	-	26,288,036,609
Sub-jumlah	2,448,670,988,143	108,386,469,889	33,495,558,435	60,407,311,412	2,583,969,211,009
Aset dalam penyelesaian	293,371,586,460	73,475,860,050	4,714,308,355	(60,407,311,412)	301,725,826,743
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	3,203,625,580	-	-	-	3,203,625,580
Jumlah	2,745,246,200,183	181,862,329,939	38,209,866,790	-	2,888,898,663,332
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	84,040,821,371	44,008,136,846	1,077,486,855	5,437,309,504	132,408,780,866
Sarana prasarana	42,485,610,292	5,747,019,754	-	(5,437,309,504)	42,795,320,542
Instalasi listrik	23,389,906,665	3,624,362,405	-	-	27,014,269,070
Mesin dan peralatan	142,359,228,948	26,345,641,099	4,716,299,664	-	163,988,570,383
Alat-alat berat	172,433,623,247	9,020,861,743	-	-	181,454,484,990
Kendaraan	62,787,474,662	9,754,894,131	5,516,707,268	-	67,025,661,525
Inventaris	19,228,575,238	2,457,753,557	242,391,331	-	21,443,937,464
Sub-jumlah	546,725,240,423	100,958,669,535	11,552,885,118	-	636,131,024,840
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	610,552,453	172,871,544	-	-	783,423,997
Jumlah	547,335,792,876	101,131,541,079	11,552,885,118	-	636,914,448,837
Nilai Buku	2,197,910,407,307				2,251,984,214,495

Pada periode maret 2022 dan 2021, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian masing-masing sebesar Rp 11.119.850.565 dan Rp 60.407.311.412.

Pada periode maret 2022 dan 2021, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari aset hak-guna dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 1.277.100.000 dan Rp 37.153.227.818 dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 466.365.653 dan Rp 7.100.510.926.

Pada periode maret 2022 dan 2021, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari uang muka pembelian masing-masing sebesar Rp 20.269.573.662 dan Rp 10.283.615.888.

Pada tahun 2021, penambahan aset tetap termasuk penambahan aset tetap dari KAN, entitas anak tidak langsung, dengan biaya perolehan sebesar Rp 4.222.117.321 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.205.562.802.

Pada tahun 2021, penambahan aset dalam penyelesaian termasuk kapitalisasi dari beban bunga sebesar Rp 775.881.751.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Beban penyusutan yang dibebankan ke operasi sebagai bagian dari berikut ini:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Beban Pokok Penjualan	21,497,368,613	82,534,437,362
Beban Administrasi dan Umum	1,755,482,162	8,291,029,989
Jumlah	23,252,850,775	90,825,467,351

Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan dengan menggunakan metode pendekatan pasar dan biaya. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah dan bangunan yang dinilai. Nilai wajar tanah dan bangunan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan KJPP Hari Utomo & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK dalam laporannya masing-masing tanggal 16 November 2018 dan 28 Desember 2018.

Kelompok Usaha memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan ("HGB") dengan jangka waktu 20-30 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2022, HGB Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 1-28 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/ diperpanjang saat jatuh tempo.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

		31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	
	Perkiraan % Penyelesaian	Nilai Tercatat	Tahun Perkiraan penyelesaian
Tanah	75%	254,283,011,700	November 2022
Bangunan, Sarana dan Prasarana	65%	34,956,684,473	Desember 2022
Mesin dan Peralatan	80%	9,360,845,323	Agustus 2022
Jumlah		298,600,541,496	
		31 Desember 2021 (Diaudit)	
	Perkiraan % Penyelesaian	Nilai Tercatat	Tahun Perkiraan penyelesaian
Tanah	72%	254,283,011,700	November 2022
Bangunan, Sarana dan Prasarana	59%	34,498,917,499	September 2022
Mesin dan Peralatan	91%	12,943,897,544	Maret 2021
Jumlah		301,725,826,743	

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

12. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Biaya ditangguhkan atas hak		
pengusahaan hutan, bersih	5,989,847,750	5,651,658,506
Biaya emisi ditangguhkan		
atas utang sukuk	1,411,362,917	691,031,250
Lain-lain	15,000,000	15,000,000
Jumlah	7,416,210,667	6,357,689,756

Kelompok Usaha memiliki hak pengelolaan hutan (“HPH”) dengan jangka waktu 43-53 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2022, HPH Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 29-32 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HPH tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang saat jatuh tempo.

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara		
Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit modal kerja		
plafon tranche B	380,000,000,000.00	380,000,000,000
RC terbatas tranche B	5,255,050,000.00	178,141,994,000
Kredit modal kerja		
plafon	90,000,000,000.00	90,000,000,000
Letter of credit		
(US\$ 1.461.986 pada		
tahun 2022 dan		
US\$ 720.933 pada		
tahun 2021)	20,978,037,680.00	10,286,995,012
RC terbatas	4,700,000,000.00	9,999,999,700
PT Bank Maspion		
Indonesia Tbk		
Demand loan	-	25,000,000,000
Rekening koran	54,019,322.00	2,833,489,206
PT Bank Central Asia Tbk		
Rekening koran	1,087,197,858.00	6,197,904,591
PT Bank Danamon		
Indonesia Tbk		
Rekening koran	99,403,833.00	169,794,297
Sub-jumlah	<u>502,173,708,693</u>	<u>702,630,176,806</u>

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
<u>Entitas Anak</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara		
Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit modal kerja		
plafon tranche B	170,000,000,000	170,000,000,000
Kredit modal kerja plafon	50,000,000,000	75,000,000,000
Letter of credit		
(US\$ 1.780.579 pada		
tahun 2022 dan		
(US\$ 1.025.938 pada		
tahun 2021)	25,549,538,552	14,639,108,316
RC terbatas tranche B	37,858,248,301	2,818,059,530
RC terbatas	1,282,883,368	1,182,891,798
PT Bank Maspion		
Indonesia Tbk		
Demand loan	90,000,000,000	150,000,000,000
Fixed loan	35,000,000,000	65,000,000,000
Rekening koran	5,288,878,552	13,252,156,485
PT Bank Danamon		
Indonesia Tbk		
Omnibus trade finance	21,766,039,451	116,450,000,000
PT Bank QNB		
Indonesia Tbk		
Demand loan	15,000,000,000	75,000,000,000
PT Bank Central Asia Tbk		
Fasilitas kredit ekspor	20,000,000,000	30,000,000,000
Kredit multi	25,000,000,000	25,000,000,000
Rekening koran	304,791,435	4,368,833,519
LC Usance		
(US\$ 0 pada		
tahun 2022 dan		
US\$ 243.750 pada		
tahun 2021)	-	3,478,075,676
Time loan revolving		
PT Bank ICBC Indonesia		
Pre-export financing		
non-LC (US\$ 750.000		
pada tahun 2022 dan		
US\$ 875.000		
pada tahun 2021)	10,761,753,750	12,485,379,375
Sub-jumlah	507,812,133,409	758,674,504,699
Jumlah	1,009,985,842,102	1,461,304,681,505

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Perusahaan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 31 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas *revolving loan* dengan batas maksimum sebesar Rp 30 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap tertentu milik Perusahaan dan *corporate guarantee* dari ILL. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan Januari 2021.

Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja berupa RC terbatas, kredit modal kerja plafon, RC terbatas *tranche* B, kredit modal kerja plafon *tranche* B, *letter of credit*/SKBDN dan *treasury line* (untuk Perusahaan, ITR, ITK dan INT) dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 20 miliar, Rp 90 miliar, Rp 230 miliar, Rp 380 miliar, US\$ 6 juta dan US\$ 2 juta. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8%-9,25% per tahun pada tahun 2021. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 September 2022 dan dijamin dengan aset tetap tertentu milik Perusahaan, ITR dan INT, piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan dan ITR serta *corporate guarantee* dari ILL.

Kelompok Usaha wajib menjaga ketentuan atau rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio *debt service coverage* minimum 100%.
- Rasio *debt to equity* maksimum 2,5x.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Pada tanggal 12 Maret 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 5 miliar dan Rp 25 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,5% per tahun pada tahun 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2022. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan milik INT, ITR dan ITK, aset tetap tertentu milik INT dan SAM serta *corporate guarantee* dari Perusahaan.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 8 Januari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dengan batas maksimum sebesar Rp 30 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,25%-10,25% per tahun pada tahun 2021. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2022 dan dijamin dengan persediaan dan aset tetap tertentu milik Perusahaan, ITR, INT, IIL dan sebagian direksi Perusahaan. Perpanjangan perjanjian tersebut sedang dalam proses.

Perusahaan terikat dengan beberapa batasan, antara lain:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio *debt service coverage* minimum 1x.
- Rasio *debt to equity* minimum 1x.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan dan entitas anaknya, ITR dan ITK, memperoleh fasilitas kredit berupa rekening koran (hanya untuk Perusahaan), *demand loan* dan *omnibus trade finance* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 20 miliar, Rp 70 miliar dan US\$ 7,5 juta (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$).

Pada tanggal 28 Desember 2020, terjadi perubahan batas maksimum fasilitas *omnibus trade finance* menjadi Rp 137.750.000.000 (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$). Pada tanggal 29 November 2021, terjadi perubahan batas maksimum fasilitas *omnibus trade finance* menjadi Rp 116.450.000.000 (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$).

Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8,75%-10% dan 10% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 4,25%-5,5% dan 5%-5,5% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2022 dan dijamin dengan aset tetap tertentu milik Kelompok Usaha. Fasilitas *demand loan* telah dilunasi pada bulan April 2021.

Kelompok Usaha wajib menjaga ketentuan atau rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt/EBITDA* maksimum 3,5x.
- *Inventory turnover* maksimum 500 hari.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Lanjutan)

- *Trade receivables turnover* maksimum 120 hari.
- Rasio *debt service coverage* minimal 1,25x.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada tanggal 6 November 2017, Perusahaan dan BRT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II) dengan batas maksimum sebesar Rp 170 miliar. Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit KMKE II dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 430 miliar. Pada tanggal 22 Desember 2020, fasilitas kredit KMKE II mengalami perubahan nama menjadi fasilitas kredit KMKE I *tranche C*.

Pada tahun 2018, Perusahaan merubah batas maksimum fasilitas kredit modal kerja ekspor I (KMKE I) *tranche A* menjadi sebesar US\$ 5.000.000 dan *tranche B* menjadi sebesar Rp 133,45 miliar.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor VIII (KMKE VIII) dengan batas maksimum sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 22 Desember 2020, fasilitas kredit KMKE VIII mengalami perubahan nama menjadi fasilitas kredit KMKE III *tranche C*.

Pada bulan September 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor III (KMKE III) dengan batas maksimum sebesar Rp 66,725 miliar. Pada tanggal 22 Desember 2020, fasilitas kredit KMKE III mengalami perubahan nama menjadi fasilitas kredit KMKE III *tranche A*.

Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga sebesar 9,65% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah masing-masing pada tahun 2021 dan 2020 dan 3%-6% dan 6% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap, piutang usaha dan persediaan tertentu milik Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan Oktober 2021.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas *revolving loan* dan fasilitas ekspor (*loan against export* dan *technical documents against acceptance*) dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 12 miliar dan Rp 120 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 7,5% per tahun di bawah *best lending rate* masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan Juni 2021.

Entitas anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2017, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit *revolving loan* dengan batas maksimum sebesar Rp 10 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11,5% dan 11%-11,5% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik INT, *corporate guarantee* dari IIL dan *personal guarantee* dari Stephanie Kane Ilham. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan Januari 2021.

Pada tanggal 6 September 2021, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja berupa RC terbatas, RC terbatas *tranche B*, kredit modal kerja plafon dan kredit modal kerja plafon *tranche B* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 85 miliar, Rp 75 miliar dan Rp 170 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8%-9,25% per tahun pada tahun 2021. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 September 2022.

Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas yang diterima oleh Perusahaan.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 November 2020, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *fixed loan* dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 30 miliar dan Rp 30 miliar.

Pada tanggal 5 November 2020, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *fixed loan* dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 30 miliar dan Rp 30 miliar. Pada tanggal 12 November 2021, ITR merubah batas maksimum fasilitas rekening koran dan *demand loan* masing-masing menjadi sebesar Rp 25 miliar dan Rp 120 miliar.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

PT Bank Maspion Indonesia Tbk (Lanjutan)

Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,5% dan 9,75% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2022.

Pada tanggal 3 Februari 2021, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dan *fixed loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 5 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,5% per tahun pada tahun 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2022.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan milik INT, ITR dan ITK, aset tetap tertentu milik INT dan SAM serta *corporate guarantee* dari Perusahaan.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Pada bulan Juni 2021, INT dan ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 45 miliar dan Rp 30 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,25% per tahun pada tahun 2021. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022 dan dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik INT dan ITK, aset tetap tertentu milik INT dan *corporate guarantee* dari Perusahaan. INT dan ITK wajib menjaga ketentuan rasio *interest service coverage* minimal 1,5x dan *gearing ratio* maksimum 3x.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 12 April 2019, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *time loan revolving* dan kredit ekspor dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 15 miliar dan Rp 30 miliar. Pada tanggal 8 Januari 2021, INT memperoleh tambahan batas maksimum fasilitas rekening koran menjadi Rp 25 miliar dan fasilitas *time loan revolving* dialihkan menjadi fasilitas kredit multi sebesar Rp 25 miliar.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2022 dan dibebani bunga sebesar 10,5% per tahun untuk fasilitas rekening koran dan 10,25% per tahun untuk fasilitas lainnya masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Perpanjangan perjanjian tersebut sedang dalam proses.

Pada bulan Agustus 2020, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas *letter of credit usance* dengan batas maksimum sebesar US\$ 1.000.000. Pada tanggal 12 Juli 2021, ITR memperoleh tambahan batas maksimum menjadi US\$ 3.500.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2022. Perpanjangan perjanjian tersebut sedang dalam proses.

Fasilitas ini dijamin dengan fasilitas yang diterima oleh Perusahaan.

PT Bank ICBC Indonesia

Pada tahun 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit *pre-export financing non-LC* dengan batas maksimum sebesar US\$ 2.000.000. Pada tahun 2020, ITR memperoleh penurunan batas maksimum fasilitas menjadi US\$ 1.500.000. Pada tanggal 24 September 2021, ITR memperoleh penurunan batas maksimum fasilitas menjadi US\$ 1.000.000. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 6,25% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2022. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan tertentu milik ITR dan jaminan pribadi dari Halim Rusli, Hendro Rusli dan Widjaja Karli. Di samping itu, ITR diwajibkan memelihara rasio *debt to equity* maksimum 3x.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor I (KMKE I) dengan batas maksimum sebesar Rp 205 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik ITR dan *corporate guarantee* dari Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 24 September 2021.

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor (KMKE) *tranche A* dan *B* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 97 miliar dan Rp 78 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,75% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan, piutang usaha dan aset tetap tertentu milik ITK dan *corporate guarantee* dari Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 14 April 2021.

Pada tanggal 7 September 2016, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor transaksional (KMKE transaksional) dengan batas maksimum sebesar Rp 60 miliar. Pada tahun 2018, INT memperoleh peningkatan batas maksimum fasilitas menjadi Rp 140 miliar.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (Lanjutan)

Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik INT. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 14 April 2021.

Sejak tahun 2013, BRT, entitas anak, memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja ekspor IV (KMKE IV) dengan batas maksimum sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun dan dibebani bunga sebesar 9,65% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Pada tanggal 22 Desember 2020, fasilitas kredit KMKE IV mengalami perubahan nama menjadi fasilitas kredit KMKE III *tranche B*. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap, piutang usaha dan persediaan tertentu milik Kelompok Usaha. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan September 2021.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 18 Oktober 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit *loan against export* dengan batas maksimum sebesar US\$ 5.000.000 (atau setara Rupiah). Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 7,5% per tahun di bawah *best lending rate* masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik ITR. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 24 Juni 2021.

- b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara		
Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi refinancing	295,312,500,000	305,156,250,000
Skema PEN	92,000,000,000	-
PT Bank Danamon		
Indonesia Tbk		
Kredit angsuran berjangka	6,248,611,111	6,816,666,667
PT BCA Finance	928,722,695	1,011,693,468
Sub-jumlah	394,489,833,806	312,984,610,135
<u>Entitas Anak</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara		
Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi		
refinancing	178,120,000,000	184,060,000,000
PT Bank Danamon		
Indonesia Tbk		
Kredit angsuran		
berjangka	32,940,815,167	35,706,092,944
PT Bank Central Asia Tbk		
Fasilitas kredit investasi	16,708,333,330	18,708,333,330
PT BCA Finance	2,475,476,000	2,219,530,054
Sub-jumlah	230,244,624,497	240,693,956,328

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Jumlah	624,734,458,303	553,678,566,463
Bagian Jatuh Tempo dalam waktu satu tahun	(107,856,222,887)	(85,682,768,158)
Bagian Jangka Panjang	516,878,235,416	467,995,798,305

PerusahaanPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *refinancing* dengan batas maksimum sebesar Rp 315 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8%-8,75% per tahun pada tahun 2021. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan September 2029. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 9.843.750.000.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan, ITK, dan ITR memperoleh fasilitas kredit berupa kredit angsuran berjangka dengan batas maksimum sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 26 Desember 2019, batas maksimum fasilitas diturunkan menjadi sebesar Rp 60 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Desember 2025 dengan masa tenggang 6 bulan. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,25%-10,25% dan 10%-10,25% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 12.975.984.174 dan Rp 4.501.256.215.

PT BCA Finance

Pada tahun 2018-2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2021-2025. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 3,75%-5,99% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 343.060.656 dan Rp 249.412.393.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor VII (KMKE VII) dengan batas maksimum sebesar Rp 200 miliar yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Januari 2022. Fasilitas pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar 9,65% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas pinjaman dijamin dengan aset tetap tertentu, piutang usaha, persediaan Perusahaan serta *personal guarantees* sebagian direksi Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan September 2021. Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 122.000.000.000 dan Rp 33.900.000.000.

Entitas anakPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 6 September 2021, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi *refinancing* dengan batas maksimum sebesar Rp 190 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 8%-8,75% per tahun pada tahun 2021. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan September 2029. Fasilitas ini dijamin dan memiliki ketentuan atau rasio keuangan yang sama dengan fasilitas jangka pendek.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 5.940.000.000.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: (Lanjutan)

Entitas Anak (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 12 April 2019, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dengan batas maksimum sebesar Rp 40 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10,25% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020 dan terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan April 2024. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan aset tetap tertentu milik INT dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

Entitas anak terikat dengan beberapa batasan, antara lain:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio *debt to equity* maksimum 1x.
- Rasio *debt service coverage* minimum 1x.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 8.000.000.000 dan Rp 8.000.000.001.

PT BCA Finance

Pada tahun 2018-2021, ITR, ITK, BRT dan INT, entitas anak, mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan angsuran bulanan hingga tahun 2025. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 3%-7,49% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 547.587.957 dan Rp 808.204.137.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi ekspor (KIE) dengan batas maksimum sebesar Rp 62 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan hingga 16 Juni 2021 dan dibebani bunga sebesar 10% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik ITK dan *corporate guarantee* dari Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 14 April 2021.

Pada tanggal 18 September 2018, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi ekspor (KIE) dengan batas maksimum sebesar Rp 11,2 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 19 September 2021 dan dibebani bunga sebesar 9,75% per tahun masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik INT. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan September 2021.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 26.999.999.989 dan Rp 15.827.333.339.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 18 Oktober 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa pinjaman dengan cicilan tetap dengan batas maksimum sebesar Rp 45 miliar yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Desember 2022. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 5% di bawah bunga pinjaman berjangka masing-masing pada tahun 2021 dan 2020 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik ITR dan *corporate guarantee* dari Perusahaan. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 24 Juni 2021.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 22.500.000.000 dan Rp 11.250.000.000.

Lain-lain

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 193.665.380 dan Rp 332.001.287.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan (*waiver*) sebagaimana diperlukan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

14. UTANG USAHA

- a. Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok sebagai berikut:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
Impor	3,429,406,748	12,719,294,155
Lokal	189,721,304,647	159,998,169,037
Jumlah	193,150,711,395	172,717,463,192
 <u>Pihak berelasi</u>		
PT Integriya Dekorindo	31,759,370	21,765,240
Jumlah	193,182,470,765	172,739,228,432

- b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Rupiah	189,753,064,017	160,019,934,277
Dollar Amerika Serikat	2,466,968,046	11,726,255,919
Euro	755,863,897	697,443,384
RMB	206,574,805	295,594,852
Sub Jumlah	193,182,470,765	172,739,228,432

- c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
1 - 30 hari	188,858,273,154	168,305,544,823
31 - 60 hari	995,044,734	782,160,009
61 – 90 hari	2,699,521,187	2,923,531,672
> 90 hari	629,631,690	727,991,928
Sub Jumlah	193,182,470,765	172,739,228,432

Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

15. ASET HAK GUNA – BERSIH

	31 Maret 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklas	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Kendaraan	12,570,469,213	2,692,000,000	-	(1,277,100,000)	13,985,369,213
Mesin dan peralatan	94,728,818,435	-	-	-	94,728,818,435
Jumlah	107,299,287,648	2,692,000,000	-	(1,277,100,000)	108,714,187,648
Akumulasi Penyusutan					
Kendaraan	2,083,018,350	478,965,054	-	(466,365,653)	2,095,617,751
Mesin dan peralatan	11,365,360,392	1,553,093,585	-	-	12,918,453,977
Jumlah	13,448,378,742	2,032,058,639	-	(466,365,653)	15,014,071,728
Nilai Buku	93,850,908,906				93,700,115,920

	31 Desember 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklas	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Kendaraan	8,599,838,325	6,719,838,161	-	(2,749,207,273)	12,570,469,213
Alat-alat berat	2,610,000,000	-	-	(2,610,000,000)	-
Mesin dan peralatan	99,896,341,853	26,626,497,127	-	(31,794,020,545)	94,728,818,435
Jumlah	111,106,180,178	33,346,335,288	-	(37,153,227,818)	107,299,287,648
Akumulasi Penyusutan					
Kendaraan	1,647,201,732	1,493,678,487	-	(1,057,861,869)	2,083,018,350
Alat-alat berat	919,791,667	-	-	(919,791,667)	-
Mesin dan peralatan	10,391,589,007	6,096,628,775	-	(5,122,857,390)	11,365,360,392
Jumlah	12,958,582,406	7,590,307,262	-	(7,100,510,926)	13,448,378,742
Nilai Buku	98,147,597,772				93,850,908,906

16. PERPAJAKAN

- a. Pajak dibayar dimuka:
Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	51,986,295,246	65,937,280,350
Jumlah	51,986,295,246	65,937,280,350

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak dibayar dimuka: (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Entitas Anak		
Pajak Pertambahan Nilai	173,952,038,757	159,114,876,239
Jumlah	173,952,038,757	159,114,876,239

b. Utang pajak terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Perusahaan		
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	12,550,000	34,465,553
Pasal 21	308,813,617	234,709,091
Pasal 22	14,202,368	45,146,349
Pasal 23	184,080,736	75,772,379
Pasal 25	1,080,555,763	1,080,555,763
Pasal 29		
Tahun 2022	6,574,044,366	-
Tahun 2021	19,734,624,877	19,734,624,877
Sub-jumlah	27,908,871,727	21,205,274,012

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Entitas Anak		
Pajak Pertambahan Nilai	3,993,488,763	4,265,458,464
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	82,655,139	97,304,916
Pasal 15	48,094,554	41,853,876
Pasal 21	235,071,736	250,402,337
Pasal 22	297,001,949	404,745,983
Pasal 23	1,410,220,498	1,186,267,178
Pasal 25	9,331,205,758	19,916,084,031
Pasal 29		
Tahun 2022	42,175,603,499	-
Tahun 2021	64,046,080,490	83,517,334,330
Sub-jumlah	121,619,422,386	109,679,451,115
Jumlah	149,528,294,113	130,884,725,127

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Lain-lain

Pada tahun 2021, Kelompok Usaha memperoleh surat ketetapan pajak sebagai berikut :

2021					
Entitas	Surat Ketetapan Pajak	Jenis Pajak	Periode	Jumlah	Tanggal Surat Ketetapan Pajak
Perusahaan	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Januari-Juni 2021	24,280,544,012.00	Maret-Agustus 2021
	Lebih Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 25	April 2020	232,532,330.00	Juni 2021
	Kurang Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Mei 2019	1,297,640.00	Februari 2021
PT Intertrend Utama	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Januari-Mei 2021	31,488,619,849.00	Maret-Juli 2021
	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Oktober-Desember 2020	14,134,892,901.00	Januari-Agustus 2021
PT Interkraft	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Januari-Agustus 2021	7,035,201,304.00	April-November 2021
	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Oktober-Desember 2020	6,121,074,894.00	Januari-Maret 2021
PT Intera Indonesia	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Januari-Juni 2021	5,479,575,343.00	April-September 2021
	Lebih Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Oktober-Desember 2020	4,238,588,383.00	Januari-Maret 2021
PT Narkata Rimba	Lebih Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 29	2019	11,449,294,324.00	Januari 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Desember 2019	12,324,687.00	Januari 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 15	Desember 2019	47,693,415.00	Januari 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 21	Desember 2019	197,048,573.00	Januari 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 23	Desember 2019	43,670,430.00	Januari 2021
	Kurang Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Desember 2019	340,891.00	Januari 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 29	2017	387,673,050.00	Oktober 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 15	Februari-Desember 2017	70,532,316.00	Oktober 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 21	Desember 2017	49,793,968.00	Oktober 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 29	2019	5,684,382,064.00	April 2021
PT Belayan River Timber	Kurang Bayar	Pajak Pertambahan Nilai	Desember 2019	13,578,272.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 21	Januari-Desember 2019	6,328,669.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 22	2019	145,231,669.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 23	Desember 2019	36,028,324.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Desember 2019	9,547,500.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 15	Desember 2019	6,349,087.00	April 2021
	Lebih Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 29	2017	92,371,833.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 21	Januari-Desember 2017	111,462,865.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 22	2017	166,126,359.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 23	Desember 2017	23,002,695.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Januari - Desember 2017	2,960,004.00	April 2021
	Kurang Bayar	Pajak Penghasilan Pasal 15	Desember 2017	5,318,454.00	April 2021

17. LIABILITAS KONTRAK

Akun ini terdiri dari uang muka yang diterima dari pelanggan yang berasal dari penjualan *furnitures* dan *log*:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Integriya Dekorindo	38,650,146	616,079,546
<u>Pihak ketiga</u>		
Ekspor	15,863,760,475	48,073,433,062
Lokal	17,084,045,415	13,507,985,481
Jumlah	32,986,456,036	62,197,498,089

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

18. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

a. Utang obligasi terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Nilai nominal	700,000,000,000	450,000,000,000
Dikurangi biaya emisi obligasi ditangguhkan yang belum diamortisasi	<u>(4,435,257,300)</u>	<u>(2,918,638,425)</u>
Jumlah	<u>695,564,742,700</u>	<u>447,081,361,575</u>
Bagian Jatuh Tempo dalam waktu satu tahun	(42,180,000,000)	(42,180,000,000)
Bagian jangka panjang	<u>653,384,742,700</u>	<u>404,901,361,575</u>

b. Sukuk mudharabah terdiri dari:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Nilai nominal	259,030,000,000	150,000,000,000
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(52,500,000,000)</u>	<u>(52,500,000,000)</u>
Jumlah	<u>206,530,000,000</u>	<u>97,500,000,000</u>

Pada tanggal 15 April 2021, Perusahaan telah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk "Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 ("Obligasi") dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021" ("Sukuk Mudharabah") masing-masing sebesar Rp450.000.000.000 dan Rp 150.000.000.000.

Obligasi Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Obligasi. Rincian Obligasi yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp 42.180.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu 370 hari; dan
- Seri B sebesar Rp 407.820.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu tiga (3) tahun.

Sukuk Mudharabah Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Sukuk Mudharabah. Rincian Sukuk Mudharabah yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp 52.500.000.000 dengan indikasi pendapatan bagi hasil sebesar 9% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu 370 hari; dan
- Seri B sebesar Rp 97.500.000.000 dengan indikasi pendapatan bagi hasil sebesar 10,25% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu lima (3) tahun.

Berdasarkan pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), Perusahaan memperoleh peringkat *idA-* (*Single A Minus*) untuk Obligasi dan *idA-(sy)* (*Single A Minus Syariah*) untuk Sukuk Mudharabah.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah di atas dijamin dengan Hak Guna Bangunan milik ITK, piutang usaha dan persediaan tertentu milik Perusahaan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

18. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH (Lanjutan)

Perusahaan menggunakan dana Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut, setelah dikurangi dengan biaya emisi, untuk melakukan pelunasan utang entitas anak, ITK dan INT, pada Indonesia Eximbank dan sisanya dipergunakan sebagai modal kerja Perusahaan dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan Perusahaan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan (*negative covenants*) antara lain untuk tidak melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan tertulis Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Wali Amanat, antara lain:

- Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perusahaan atau yang akan mempunyai dampak negatif yang material.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan.
- Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Kelompok Usaha.
- Mengalihkan aset tetap yang jumlahnya melebihi 20% dari total aset Perusahaan.
- Mengubah bidang usaha utama.
- Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Mengeluarkan obligasi, sukuk atau efek-efek lainnya melalui Pasar Modal yang dijamin secara khusus.

Di samping itu, Perusahaan juga diwajibkan untuk memelihara beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- EBITDA terhadap jumlah beban bunga minimal 1,25x.
- Rasio *debt to equity* maksimum 3x.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan telah memenuhi seluruhnya persyaratan rasio-rasio keuangan yang ditentukan pada perjanjian penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Pada tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan telah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk "Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 ("Obligasi") dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022" ("Sukuk Mudharabah") masing-masing sebesar Rp250.000.000.000 dan Rp 109.030.000.000.

Obligasi Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Obligasi. Rincian Obligasi yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp 197.470.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu tiga (3) Tahun; dan
- Seri B sebesar Rp 52.530.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu lima (5) tahun.

Sukuk Mudharabah Perusahaan yang dikeluarkan terdiri dari dua (2) seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B dengan penawaran masing-masing 100% dari jumlah pokok Sukuk Mudharabah. Rincian Sukuk Mudharabah yang telah didistribusikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp 83.800.000.000 dengan indikasi pendapatan bagi hasil sebesar 9% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu tiga (3) tahun; dan
- Seri B sebesar Rp 25.230.000.000 dengan indikasi pendapatan bagi hasil sebesar 9,75% per tahun yang dibagikan per tiga (3) bulan, berjangka waktu lima (5) tahun.

Berdasarkan pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), Perusahaan memperoleh peringkat *idA* (*Single A*) untuk Obligasi dan *idA(sy)* (*Single A Syariah*) untuk Sukuk Mudharabah.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perusahaan untuk modal kerja Perusahaan, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

a. Modal Saham

Rincian pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)			
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4,573,835,000	71.89%	457,383,500,000
Masyarakat	1,788,665,000	28.11%	178,866,500,000
Jumlah/Total	6,362,500,000	100%	636,250,000,000

31 Desember 2021 (Diaudit)			
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4,573,835,000	71.89%	457,383,500,000
Masyarakat	1,788,665,000	28.11%	178,866,500,000
Jumlah/Total	6,362,500,000	100%	636,250,000,000

b. Tambahan modal disetor

Rincian akun tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
Tambahan modal disetor di atas nilai nominal	221,562,562,853	221,562,562,853
Biaya emisi saham	(6,142,500,000)	(6,142,500,000)
Selisih transaksi kombinasi bisnis antar entitas sependangali	82,846,704,551	82,846,704,551
Pengampunan pajak	1,047,708,333	1,047,708,333
Jumlah	299,314,475,737	299,314,475,737

Saldo tambahan modal disetor di atas nilai nominal berasal dari selisih antara hasil penerimaan dari Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2017 atas 1.250.000.000 lembar saham kepada masyarakat dengan nilai nominalnya dan MESOP.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)

c. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan transaksi penyertaan saham pada BRT, ITR dan ITK, entitas anak. Pada tahun 2020, ITR, entitas anak, melakukan transaksi penyertaan saham pada SAM. Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan pelepasan penyertaan saham pada ITD

Transaksi tersebut di atas dilakukan antara entitas sepengendali dalam rangka kombinasi bisnis sehingga diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) mengenai "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Selisih neto nilai transaksi kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali yang dicatat sebagai "Tambahan modal disetor" sehubungan dengan transaksi penyertaan saham di entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

31 Maret 2022

	Tahun akuisisi/ Year of acquisition	Harga jual/ Selling price	Aset bersih yang diperoleh/ Net assets Acquired	Selisih/ Difference	
Entitas anak					Subsidiaries
KDA	2021	12,000,000,000	4,431,195,434	(7,568,804,566)	KDA
SAM	2020	6,750,000,000	3,953,644,773	(2,796,355,227)	SAM
BRT	2012	13,125,600,000	27,736,469,667	14,610,869,667	BRT
ITR	2012	7,524,000,000	9,096,469,925	1,572,469,925	ITR
ITK	2012	4,653,000,000	12,515,357,864	7,862,357,864	ITK
Jumlah		44,052,600,000	57,733,137,663	13,680,537,663	Total

31 Desember 2021

	Tahun akuisisi/ Year of acquisition	Harga jual/ Selling price	Aset bersih yang diperoleh/ Net assets Acquired	Selisih/ Difference	
Entitas anak					Subsidiaries
KDA	2021	12,000,000,000	4,431,195,434	(7,568,804,566)	KDA
SAM	2020	6,750,000,000	3,953,644,773	(2,796,355,227)	SAM
BRT	2012	13,125,600,000	27,736,469,667	14,610,869,667	BRT
ITR	2012	7,524,000,000	9,096,469,925	1,572,469,925	ITR
ITK	2012	4,653,000,000	12,515,357,864	7,862,357,864	ITK
Jumlah		44,052,600,000	57,733,137,663	13,680,537,663	Total

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Tabel berikut ini menjelaskan komponen dari hak pemegang saham non-pengendali entitas anak pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)
PT Inter Kayu Mandiri	3,318,985,380	3,318,985,380
PT Interkraft	2,692,816,033	2,653,240,576
PT Intertrend Utama	2,606,629,694	2,383,893,040
PT Belayan River Timber	608,126,833	(1,277,539,266)
PT Intera Indonesia	716,681,635	655,009,507
PT Narkata Rimba	1,261,572,023	1,224,125,430
PT Kandelia Alam	(434,118,061)	1,649,093,637
Jumlah	10,770,693,537	10,606,808,304

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

21. PENJUALAN BERSIH

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)
Ekspor		
Manufaktur		
<i>Building component</i>	1,440,322,255,892	489,848,691,487
<i>Set up</i>	247,911,912,036	142,811,318,949
<i>Knock down</i>	211,931,683,647	253,887,746,874
Lokal		
Manufaktur		
<i>Building component</i>	27,939,302,880	6,872,004,889
<i>Set up</i>	7,375,568,800	2,445,979,730
<i>Knock down</i>	5,338,348,062	17,279,183
Kehutanan	34,862,630,310	7,819,222,690
Perdagangan	-	8,357,715,393
Jumlah	1,975,681,701,627	912,059,959,195

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi penjualan lebih dari 10% dari jumlah penjualan bersih konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)		31 Desember 2021 (Diaudit)	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan bersih	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan bersih
Hampton Lumber Sales	232,380,254,768	11.76%	960,353,121,694	17.73%
Target Store	-	-	564,861,623,088	10.43%

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022 (Tidak diaudit)	31 Maret 2021 (Tidak Diaudit)
<u>Manufaktur dan Kehutanan</u>		
Pemakaian bahan baku	853,749,682,554	441,915,862,951
Upah buruh langsung	115,585,824,091	103,890,623,093
Beban pabrikasi	130,976,126,188	121,641,797,077
Jumlah beban produksi	1,100,311,632,833	667,448,283,121
Barang dalam proses		
Awal tahun	516,015,807,630	463,904,635,358
Akhir tahun	(442,662,279,071)	(521,267,024,003)
Jumlah beban pokok produksi	1,173,665,161,392	610,085,894,476

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

22. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	31 Maret 2022	31 Maret 2021
	(Tidak diaudit)	(Tidak Diaudit)
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	482,765,473,214	363,838,656,990
Pembelian barang jadi	52,553,748,827	81,067,731,562
Akhir tahun	(394,017,777,283)	(447,921,397,683)
Sub-jumlah	1,314,966,606,150	607,070,885,345
 Persediaan dalam perjalanan awal	-	497,279,430
Persediaan dalam perjalanan akhir	-	(1,863,038,498)
Sub-jumlah	1,314,966,606,150	605,705,126,277
 <u>Perdagangan</u>		
Persediaan awal	-	46,797,712,229
Pembelian	-	3,849,005,859
Persediaan akhir	-	(45,353,641,981)
Sub-jumlah	-	5,293,076,107
Jumlah beban pokok penjualan	1,314,966,606,150	610,998,202,384

23. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban penjualan dan umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022	31 Maret 2021
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
<u>Beban penjualan</u>		
Kurir dan ekspor	234,041,733,918	49,552,124,068
Gaji dan tunjangan	1,078,270,158	1,368,838,712
Ongkos angkut	3,368,882,140	1,137,814,411
Penyusutan	-	1,720,195,151
Perjalanan Dinas	397,186,641	110,894,955
Riset dan Pengembangan	1,262,974,841	150,164,552
Amortisasi	-	427,905,511
Promosi	2,020,166,000	127,860,425
Komisi	19,655,165,340	12,405,945,786
Lain-lain (masing-		-
masing dibawah Rp 2 miliar)	26,039,633,254	3,591,175,143
Jumlah	287,864,012,292	70,592,918,714

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

23. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)

Rincian beban penjualan dan umum dan administrasi adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	31 Maret 2022	31 Maret 2021
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
<u>Beban umum dan administrasi</u>		
Gaji dan tunjangan	18,957,360,227	19,210,775,307
Pajak	634,822,108	947,205,528
Imbalan Kerja	2,933,947,567	3,600,169,619
Penyusutan	1,755,482,162	1,937,139,585
Asuransi	1,847,827,879	1,904,427,053
Jamuan dan sumbangan	10,333,060,001	508,314,627
Keperluan kantor	3,074,016,987	679,576,822
Sewa	571,593,799	76,072,444
Jasa profesional	7,576,810,492	9,548,781,640
Perbaikan dan pemeliharaan	860,364,637	591,942,670
Perjalanan dinas	248,715,253	99,152,974
Transportasi	689,859,979	507,224,501
Iuran dan perijinan	41,117,512	179,370,150
Lain-lain (masing-		
masing dibawah Rp 2 miliar)	1,283,645,878	1,786,429,059
Jumlah	50,808,624,481	41,576,581,979

24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi usaha dan non usaha dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

a. Sifat hubungan dan transaksi

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
PT Integra Indo Lestari (IIL)	Induk Perusahaan	Jasa profesional dan beban bunga
PT Interkreasi Kerta Aji (IKA)	Perusahaan Afiliasi	Penjualan
PT Alam Mentari Sejahtera (AMS)	Perusahaan Afiliasi	Penjualan
PT Integriya Dekorindo (ITD)	Entitas Asosiasi	Penjualan dan Pembelian

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Transaksi

Penjualan bersih ke pihak berelasi (sebagai persentase terhadap jumlah penjualan bersih):

	31 Maret 2022	31 Maret 2021
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Penjualan Bersih - PT Integriya Dekorindo	4,996,136,309	-
Penjualan Bersih - AMS	837,059,900	-
Penjualan Bersih - IKA	-	815,506,900
Jumlah	5,833,196,209	815,506,900
Persentase terhadap penjualan	0.30%	0.09%

Beban (sebagai persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi):

	31 Maret 2022	31 Maret 2021
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Jasa manajemen IIL	4,172,350,266	8,194,444,470
Persentase terhadap beban umum dan administrasi	8.21%	19.71%

IIL memberikan jasa manajemen di bidang akuntansi, keuangan, pajak, sumber daya manusia dan dukungan jasa teknologi informasi kepada Perusahaan, ITR, ITK, NKT, BRT dan INT.

	31 Maret 2022	31 Maret 2021
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Beban bunga - IIL	-	4,054,312,043
Persentase terhadap beban bunga	0.00%	7.64%

c. Saldo

Aset (sebagai persentase terhadap jumlah aset):

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Piutang usaha	407,052,410	7,171,185,531
Piutang lain-lain	148,070,004,792	139,763,822,656
Jumlah	148,477,057,202	146,935,008,187
Persentase terhadap aset	2.10%	2.16%

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2022
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

24. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

c. Saldo (Lanjutan)

Liabilitas (sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas):

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Utang Usaha	-	21,765,240
Utang lain-lain		
Jangka pendek	1,700,000,042	1,700,000,042
Jangka panjang	-	-
Liabilitas kontrak	38,650,146	616,079,546
Jumlah	1,738,650,188	2,337,844,828
Persentase terhadap		
liabilitas	0.05%	0.07%

25. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022	31 Maret 2021
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Laba tahun berjalan	206,777,732,150	101,847,895,312
Jumlah rata-rata tertimbang		
saham yang beredar	6,362,500,000	6,306,250,000
Laba per saham		
dasar dan dilusian	130.00	64.60

26. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)			31 Desember 2021 (Diaudit)		
	Mata Uang Asing		Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing		Ekuivalen Rupiah
ASET						
Kas dan setara kas	US\$	3,536,214	50,737,609,701	US\$	7,151,851	102,049,651,998
Piutang usaha	US\$	40,888,825	586,713,949,515	US\$	37,314,079	532,434,800,446
Jumlah			637,451,559,216			634,484,452,444
LIABILITAS						
Utang bank dan lembaga						
keuangan bukan bank	US\$	3,992,565	57,289,329,982	US\$	2,865,621	40,889,558,379
Utang usaha	US\$	171,926	2,466,968,045	US\$	821,799	11,726,255,919
	EUR	47,231	755,863,897	EUR	43,247	697,443,384
	RMB	91,411	206,574,805	RMB	132,078	295,594,852
Jumlah			60,718,736,729			53,608,852,534
Aset - bersih			576,732,822,487			580,875,599,910

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada periode 31 Maret 2022 dan Tahun 2021.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2022

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pada tanggal 22 April 2022 Perusahaan melakukan pembayaran Obligasi Seri A sebesar Rp 42.180.000.000 dan Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp 52.500.000.000.